

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah reformasi bergulir pada tahun 1998, keinginan masyarakat untuk melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan bergulir dengan cepat di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan daerah seperti Riau Kepulauan dan Papua malah berkeinginan lebih dari otonomi daerah yaitu keinginan kemerdekaan atas wilayah mereka. Menurut Gusti Asnan, bahwa sesungguhnya tuntutan-tuntutan di atas adalah “dendang lama” yang dikumandangkan kembali pada masa reformasi karena tuntutan otonomi sudah muncul pada tahun 1950-an.

Salah satu daerah yang melakukan tuntutan tersebut adalah Sumatera Barat melalui Dewan Banteng yang berakhir dengan peristiwa PRRI.¹ Untuk era reformasi, Sumatera Barat juga merespon “gairah” otonomi daerah melalui pemekaran beberapa kabupaten, dengan memanfaatkan UU No. 22/1999 tentang pemerintah daerah yang direvisi menjadi UU No.32/2004 yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu kabupaten hasil pemekaran itu adalah Kabupaten Solok Selatan.

Pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan demokrasi, meningkatkan keamanan dan ketertiban.

¹ Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hal.5

Dengan kata lain, pembentukan daerah otonom harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: faktor ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, sosial politik, sosial budaya, dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.²

Begitu juga Kabupaten Solok Selatan yang mana sebelum mengalami pemekaran merupakan bagian selatan Kabupaten Solok, yang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Sangir. Ide pemisahan wilayah itu sebenarnya sudah ada semenjak 1950-an yang ditandai dengan diadakannya “Konferensi Timbulun”. Pada waktu itu hendak dibentuk kabupaten dengan nama Kabupaten Sehilir Batang Hari, dengan memasukkan wilayah Kecamatan Pantai Cermin dan Lembah Gumanti. Perjuangan yang tiada henti itu akhirnya membuahkan hasil 53 tahun kemudian dengan diresmikannya Kabupaten Solok Selatan sebagai kabupaten otonom bersama 24 kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Pada akhir tahun 2003, Kabupaten Solok dimekarkan menjadi Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003. Pada 7 Januari 2004 diresmikanlah 24 kabupaten baru di Indonesia yang tiga di antaranya terdapat di Sumatera Barat, yakni Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya, dan Pasaman Barat. Namun wilayah yang menjadi Kabupaten Solok Selatan hanya mencakup wilayah dari kecamatan induk Sungai Pagu

² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federasi sebagai Suatu Alternatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal.16-17

dan Sangir, yang pada saat pemekaran telah berkembang menjadi lima kecamatan.

Setelah diresmikan Solok Selatan menjadi Kabupaten baru bersamaan dengan Kabupaten lain yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat pada awal tahun 2004, saat itulah Kabupaten Solok Selatan memulai menata dan menjalankan roda pemerintahan tanpa tergantung pada pemerintahan induk yaitu Kabupaten Solok. Hal ini ditandai dengan dilantiknnya Pj. Bupati Solok Selatan tiga hari setelah peresmian pemekaran. Tanggal 10 Januari 2004. Gubernur Sumatera Barat melantik Aliman Salim sebagai bupati pertama Kabupaten Solok Selatan. Akan tetapi tidak lama setelah itu tepatnya pada tanggal 12 Februari 2005 gubernur melantik Marzuki Omar sebagai Pj. Bupati kedua. Menurut keterangan yang didapat di lapangan, bahwa pergantian bupati Solok Selatan ini terjadi karena Aliman Salim mencalonkan diri sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Barat pada periode 2005-2010.³

Solok Selatan yang diresmikan pada 7 Januari 2004 sebagai sebuah Kabupaten, secara garis besar dihuni oleh etnis Minangkabau. Di samping itu juga dihuni oleh etnis Jawa yang telah datang sejak zaman Kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan. Saat ini penduduk Kabupaten Solok Selatan berjumlah 144.281 jiwa dengan kepadatan rata-rata 40,19 jiwa/Km.⁴ Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah umat Islam yang ada di sana diperkirakan

³ Arsip pemerintah Solok Selatan

⁴ Kantor BPS Solok Selatan

sekitar 99, 6 persen, sedangkan sisanya adalah penganut agama Kristen Protestan, Katolik dan Hindu.⁵

Melihat kasus kejahatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan, penulis telah mengambil keterangan dengan cara wawancara dengan seorang tokoh masyarakat Kabupaten Solok Selatan yaitu Bahasri (As bagak), “Sebelum daerah ini menjadi kabupaten atau masih berupa kecamatan yang dipimpin oleh Camat, kehidupan masyarakat tidak teratur sama sekali, seperti banyaknya pemuda yang suka mabuk-mabukan, mencuri, serta bertengkar dan melakukan kejahatan lainnya. Sedangkan hukum di kecamatan ini belum terlalu kuat. Kebanyakan penyelesaian dari kasus kejahatan diselesaikan secara hukum adat yang tidak terlalu membuat para pelaku kejahatan menjadi jera.

Sebagai sarana penunjang kehidupan beragama mereka, masyarakat Islam Solok Selatan sebelum tahun 2004 sudah memiliki lembaga pendidikan agama, seperti: Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), TPA/MDA, tempat ibadah (Masjid, Surau dan Mushalla) serta juga sudah ada diantara masyarakat yang telah melaksanakan Ibadah haji, namun masih terbatas. Setelah terbentuk menjadi sebuah kabupaten terlihatlah bahwa adanya peningkatan, baik dalam bidang pendidikan agama seperti berdirinya RA dan MI yang sebelumnya tidak ada, juga dari segi tempat ibadah seperti

⁵ <http://solselwisata.blogspot.com/2011/04/penduduk-solok-selatan.html>

bertambahnya jumlah masjid, mushalla dan surau, selain itu juga meningkatnya jumlah jama'ah haji ⁶

Jadi, dengan pemekaran Solok Selatan menjadi Kabupaten Solok Selatan, jelaslah berdampak baik yaitu dari segi peningkatan dalam pendidikan agama (Raudatul Athfal sampai kepada Madrasah Aliyah), peningkatan jumlah jama'ah haji dan penyelesaian kasus-kasus kejahatan secara hukum Negara.

Berangkat dari masalah ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Dinamika Kehidupan Beragama Masyarakat Islam Kabupaten Solok Selatan (Tinjauan Sosio-Historis 2004-2012)”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari pembahasan ini adalah:

- a. Bagaimana dinamika kehidupan beragama masyarakat Islam Kabupaten Solok Selatan semenjak tahun 2004-2012. Khusus dibidang lembaga pendidikan agama, sarana ibadah, zakat, haji dan patalogi sosial (penyakit masyarakat).
- b. Bagaimana dampak/ pengaruh pemekaran wilayah terhadap kehidupan beragama masyarakat Islam Solok Selatan, khusus dibidang lembaga

⁶ *Ibid*

pendidikan agama, sarana ibadah, zakat, haji dan patalogi sosial (penyakit masyarakat).

2. Batasan masalah

a. Batasan Tematis

Batasan tematis dari penelitian ini adalah Sejarah Sosial kehidupan beragama masyarakat Islam.

b. Batasan Temporal

Adapun batasan temporal dari penelitian ini adalah dari tahun 2004, yang merupakan tahun diresmikannya Kabupaten Solok Selatan. Sementara batas akhirnya adalah 2012 karena tahun ini Solok Selatan dalam tahap perkembangan dalam bidang keagamaan.

c. Batasan Spasial

Batasan Spasial dari tulisan ini adalah Kabupaten Solok Selatan, Propinsi Sumatera Barat, yaitu berada pada jajaran Pegunungan Bukit Barisan yang termasuk dalam daerah Patahan Semangko. Posisi daerah secara geografis berada pada $01^{\circ} 17' 13''$ - $01^{\circ} 46' 45''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 53' 24''$ - $101^{\circ} 26' 27''$ Bujur Timur. Dengan luas wilayah lebih kurang 3.346,20 Km². Tepatnya berada di bagian Selatan Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif Kabupaten Solok Selatan berbatasan:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kab. Kerinci
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui:
 - a. Untuk mengetahui dinamika kehidupan beragama masyarakat Islam Kabupaten Solok Selatan semenjak tahun 2004-2012. Khusus dibidang lembaga pendidikan agama, sarana ibadah, zakat, haji dan patalogi sosial (penyakit masyarakat).
 - b. Untuk mengetahui dampak/ pengaruh pemekaran wilayah terhadap kehidupan beragama masyarakat Islam Solok Selatan, khusus dibidang lembaga pendidikan agama, sarana ibadah, haji dan patalogi sosial (penyakit masyarakat).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis
- b. Sebagai informasi dan motifasi bagi masyarakat Solok Selatan untuk meningkatkan nilai-nilai agama.
- c. Sekaligus juga diharapkan bisa menjadi referensi dan bahan bacaan bagi masyarakat umum dan bagi sejarawan-sejarawan yang akan menulis peristiwa sejarah yang terjadi di Solok Selatan.
- d. Untuk salah satu syarat menyelesaikan studi S2 Konsentrasi Sejarah Peradaban Islam di Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.

D. Defenisi Operasional

Untuk memahami judul di atas perlu dijelaskan kata kuncinya, yakni dinamika, kehidupan beragama, dan masyarakat.

1. Dinamika adalah kekuatan dan gerak yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.⁷ Yang dimaksud di sini adalah bagaimana gerakan-gerakan atau perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Solok Selatan.
2. Kehidupan beragama. Kehidupan berasal dari kata “hidup” yang diberi awalan “ke dan akhiran an”. Sedangkan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah cara (keadaan, hal) hidup, Sedangkan Pengertian beragama berasal dari kata “agama” yang diberi awalan “ber”. Sedangkan dalam *Kamus Bahasa Indonesia* adalah menganut atau memeluk agama⁸.
3. Pengertian masyarakat adalah hubungan antara manusia (pergaulan hidup manusia).⁹ Pengertian masyarakat menurut Koentjaraningrat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu dan terikat oleh suatu rasa

⁷ Hasan Alwi, , *Kepala Pusat Bahasa, Pemimpin Redaksi KBBI edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal 259.

⁸ Poerwadarminta dan Pusat Bahasa dan Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia ed.III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

⁹ Suharto dan Tata Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Indak. 1996) hal. 167

identitas bersama.¹⁰ Masyarakat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah masyarakat yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

Jadi yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana dinamika (perubahan) yang terjadi dalam kehidupan beragama masyarakat Solok Selatan setelah kabupaten ini diresmikan pada tahun 2004.

E. Tinjauan kepustakaan

Setelah dilakukan penelusuran terhadap sumber-sumber yang ada di perpustakaan, maka telah ditemukan berapa karya ilmiah serta buku yang berkaitan dengan pemekaran kabupaten, di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Nasution dari Fakultas Sastra, Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Andalas yang berjudul “Pemekaran Wilayah di Sumatera Barat: Studi tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya”¹¹ dan skripsi yang ditulis oleh Yuhelmi Indra Fakultas Sastra, Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Andalas yang berjudul “Reformasi dan Pemekaran Wilayah: Studi tentang Pembentukan Kabupaten Pasaman Barat”. Kedua skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana proses pembentukan Kabupaten Dharmasraya dan Pasaman Barat, serta dinamika pemerintahan setelah berdirinya kabupaten tersebut.

Hubungannya dengan tesis ini adalah sama-sama membahas tentang pembentukan kabupaten baru, akan tetapi bedanya adalah dalam tesis ini

¹⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2000), hal. 146-147

¹¹ Nasution, *Pemekaran Wilayah di Sumatera Barat: Studi Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya*, (Padang: jurusan sejarah fakultas sastra uiversitas andalas, 2009)

lebih melihat kehidupan beragama masyarakat Solok Selatan setelah kabupaten ini diresmikan.

Sumber lain yaitu karya ilmiah (tesis) yang ditulis oleh: Mami Nofrianti dari jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Prodi Kajian Islam, Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, judul Kehidupan Keagamaan Di Lingkungan Petani Karet Di Kenagarian Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Lingo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Yang menjelaskan tentang Bagaimana Bentuk Kehidupan Keagamaan Di Lingkungan Petani Karet Di Kenagarian Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Lingo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dan menjelaskan pengaruh perkebunan karet terhadap kehidupan masyarakat dibidang ekonomi, pendidikan dan kehidupan beragama.

Hubungannya dengan tesis ini adalah sama-sama membahas tentang kehidupan beragama masyarakat Islam, bedanya hanya pada sebab yang mempengaruhinya. Kalau tesis Mami Nofrianti melihat dari pengaruh perkebunan karet, sedangkan tesis ini melihat dampak dari pemekaran wilayah.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahap pengumpulan data atau sumber dalam penelitian sejarah. Data atau sumber yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapat dari dokumen atau arsip pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan pemerintah Kabupaten Solok, dengan cara mengajukan surat izin penelitian kepada kantor/instansi terkait. Pengumpulan sumber yang pertama adalah melalui lembaga pemerintahan yang menyimpan arsip tentang pemekaran daerah, data tentang lembaga pendidikan agama, sarana ibadah, zakat, haji serta jumlah kejahatan yang terjadi di Solok Selatan. diantaranya Badan Pemerintahan Umum, SETDA (Sekretariat Daerah) Solok Selatan, kemudian kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Solok Selatan, kantor Kemenag Solok Selatan dan yang terakhir adalah kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Solok Selatan. Di samping itu didapatkan pula data melalui wawancara. Wawancara dilakukan langsung dengan informan yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat diantaranya adalah Bahasri (As Bagak) yang merupakan anggota seksi Transportasi Panitia Pembentukan Kabupaten Solok Selatan . Selanjutnya beberapa tokoh masyarakat dan ulama Solok Selatan yang merasakan sendiri bagaimana kondisi setelah adanya pemekaran di antaranya: Sarkawi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kepala Pondok Pesantren Bustanul Huda) yang bertugas di Solok Selatan, Burhanuddin Kepala Kemenag Solok Selatan, Indra pegawai Kantor Kemenag bagian

Pendidikan Islam (Pendis) Solok Selatan, Mayunar (ulama Solok Selatan), Ida Syahlen (Guru TPA/MDA), Sri Wahyuni (Guru Pesantren sekaligus Guru Mengaji).

Sumber yang kedua adalah sumber sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi buku-buku yang berkaitan dengan pemekaran, kehidupan beragama, serta buku-buku yang berkaitan dengan pemerintahan Solok Selatan, serta berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Kritik Sumber

Sumber yang telah ditemukan melalui tahapan heuristik kemudian dikritik atau diuji (diseleksi) pada tahapan kritik sumber, meliputi kritik ekstern (pengujian material), yang berkaitan dengan wawancara maka di lihat bagaimana latarbelakang narasumber, apakah dia berpotensi menambah atau mengurangi isi informasi, Kritik intern (pengujian isi informasi) yang didengar dari penjelasan yang disampaikan narasumber. Tujuan melakukan kritikan ini adalah supaya data yang didapatkan, terjamin keasliannya dan untuk mengetahui kredibilitas sumber, sehingga terbentuk fakta-fakta yang dibutuhkan.

3. Sintesis

Pada tahap ini fakta yang sudah terbentuk melalui tahapan kritik sumber kemudian akan disintesis atau dirangkai. Kerja sintesis ini adalah membuat jalinan fakta secara keseluruhan, sehingga terbentuklah suatu jalinan atau rangkaian cerita sejarah yang logis.

4. Penulisan

Tahapan akhir adalah penulisan dari keseluruhan fakta-fakta yang telah melalui tahapan kritik dan kemudian digabungkan untuk menjadi sebuah karya sejarah ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini memuat pembahasan sebagai berikut:

- ❖ Bab I: Pendahuluan, latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfa'at penelitian, defenisi operasional, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- ❖ Bab II: Landasan Teoritis: kehidupan beragama, masyarakat Islam, pengertian zakat dan pengertian haji.
- ❖ Bab III: Gambaran Umum Kabupaten Solok Selatan: Monografi Kabupaten Solok Selatan, Demografi Kabupaten Solok Selatan dan pembentukan Kabupaten Solok Selatan.
- ❖ Bab IV: Dinamika Kehidupan Beragama Masyarakat Kabupaten Solok Selatan tahun 2004-2012: lembaga pendidikan agama, tempat ibadah, zakat, haji dan patologi sosial.
- ❖ Bab V: Penutup: Kesimpulan dan Saran.